

STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN PENGUATAN MUTU DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Zakia Rohalia

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
Email : rohaliyakia@gmail.com

Abstract

Keywords:

*Inclusive Education,
Education Quality,
Equitable Access,
Learning Strategies*

This study aims to analyze inclusive education strategies and quality improvement efforts in achieving educational equity in Indonesia. Amid persistent disparities in access and learning quality, inclusive approaches have become essential to fulfilling the rights of all children, particularly those with special needs and those from marginalized communities. The research employs a library research method using a qualitative approach, reviewing legal frameworks, previous studies, and both national and international education policy documents concerning inclusive education. The findings reveal that the implementation of inclusive education in Indonesia still encounters structural and cultural barriers, such as limited teacher capacity, lack of adequate infrastructure, and policies that are not yet fully adaptive. Nevertheless, several progressive initiatives at the regional level demonstrate successful models through participatory approaches, inclusive teacher training, and curriculum modifications based on students' diverse needs. Additionally, educational quality is being strengthened through competency-based assessments and differentiated pedagogy, contributing significantly to equity efforts. This study offers deeper insights into the importance of integrating inclusive strategies with quality enhancement as a unified educational system. The practical implication suggests the necessity for intersectoral collaboration to accelerate the transformation toward a more equitable, inclusive, and high-quality education across all regions in Indonesia

Abstrak

Kata Kunci :

*Pendidikan Inklusif,
Mutu Pendidikan,
Kesetaraan Akses,
Strategi Pembelajaran*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendidikan inklusif dan peningkatan mutu pendidikan dalam upaya mencapai kesetaraan pendidikan di Indonesia. Di tengah tantangan ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan, pendekatan inklusif menjadi krusial untuk menjamin terpenuhinya hak semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus dan berasal dari kelompok marjinal. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif yang

menelaah berbagai regulasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan nasional dan internasional terkait pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya pemahaman guru, minimnya fasilitas, dan kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif. Namun, terdapat inisiatif progresif dari berbagai daerah yang menunjukkan keberhasilan pendekatan partisipatif, pelatihan guru inklusif, dan modifikasi kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan melalui asesmen berbasis kompetensi dan pendekatan pedagogis diferensial turut memperkuat pencapaian kesetaraan. Penelitian ini berdampak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi strategi inklusif dengan upaya peningkatan mutu sebagai satu kesatuan sistem pendidikan. Implikasi praktisnya, diperlukan sinergi lintas sektor untuk mempercepat transformasi pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](#) license



PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan fondasi utama dalam membentuk sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman peserta didik. Konsep ini secara konseptual merujuk pada prinsip bahwa setiap anak, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, memiliki hak untuk memperoleh pendidikan berkualitas dalam lingkungan belajar yang sama. UNESCO (2009) menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menjawab keberagaman dengan meningkatkan partisipasi dan mengurangi eksklusi dalam dan dari sistem pendidikan (Munawir et al., 2025). Komitmen global terhadap prinsip ini ditegaskan dalam *Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (1994), yang merekomendasikan pengintegrasian peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler (Irdamurni, 2020). Dalam konteks sosial-budaya Indonesia yang multietnis, multireligi, dan majemuk dalam stratifikasi sosial, pendidikan inklusif menjadi sangat relevan sebagai strategi untuk membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga merangkul semua elemen bangsa secara adil dan bermartabat.

Penting untuk membedakan pendidikan inklusif dari pendekatan integratif dan segregatif yang selama ini sering kali disalahpahami. Pendidikan segregatif menempatkan peserta didik dengan kebutuhan khusus di lembaga khusus, terpisah dari arus utama pendidikan (Irdamurni, 2020). Sedangkan pendekatan integratif, meski mulai menggabungkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum, belum sepenuhnya mengubah pendekatan kurikulum dan pengajaran. Sebaliknya, pendidikan inklusif menuntut transformasi sistemik: dari struktur kelembagaan, metode pembelajaran,



asesmen, hingga paradigma para pelaku pendidikan. Pendidikan inklusif bukanlah soal menyatukan ruang kelas secara fisik, melainkan menciptakan ruang psikologis dan pedagogis yang mengakui dan merespons keberagaman secara positif. Dalam masyarakat Indonesia yang kerap kali menyimpan bias terhadap kelompok disabilitas dan minoritas sosial, pendidikan inklusif hadir sebagai pendekatan etis dan strategis yang tidak hanya membentuk individu yang cakap, tetapi juga masyarakat yang manusiawi dan adil.

Dari sisi teori dan regulasi, pendekatan pendidikan inklusif berakar pada teori keadilan sosial dalam pendidikan. Teori John Rawls tentang *Justice as Fairness* menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil, terutama bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan (Shofi et al., 2025). Di sisi lain, Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* menekankan pentingnya pendidikan sebagai praksis pembebasan, di mana peserta didik bukan hanya objek pendidikan, tetapi subjek yang memiliki suara dan pengalaman hidup yang sah untuk dikonstruksikan dalam proses belajar (Ikmal, 2021). Landasan yuridis nasional memperkuat legitimasi pendidikan inklusif, antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif (Andriani et al., 2024). Di tingkat teknis, Permendikbud No. 70 Tahun 2009 menjadi tonggak penting dalam mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, meskipun implementasinya masih jauh dari ideal (Nurfadhillah, 2021).

Kendati kerangka hukum dan filosofis telah cukup memadai, tantangan di tingkat praksis masih sangat kompleks. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) SMA di Indonesia mencapai 84,4%, namun jika dirinci menurut wilayah dan status sosial-ekonomi, kesenjangan mencolok terjadi: APK di Papua hanya 59,1%, jauh di bawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga masih timpang antar daerah, yang mencerminkan kualitas pendidikan yang belum merata (Anandhari & Silviana, 2025). Di sisi lain, pandemi COVID-19 memperlebar jurang ketidaksetaraan dengan munculnya fenomena *learning loss* dan *digital divide* (Lestari et al., 2025). Sumber daya manusia pendidik belum sepenuhnya memiliki kompetensi untuk mengelola kelas yang heterogen, baik secara pedagogik maupun sosial-emosional. Sarana prasarana pendukung seperti aksesibilitas fisik, perangkat TIK, dan materi ajar adaptif juga belum terdistribusi secara proporsional. Di sinilah letak urgensi pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada inklusivitas sebagai semangat, tetapi juga mutu sebagai syarat keberlanjutan.

Dalam dua dekade terakhir, literatur akademik dan kebijakan publik menunjukkan perkembangan penting dalam pendekatan strategis terhadap pendidikan inklusif dan penguatan mutu. Sejumlah studi kontemporer menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kualitas manajemen sekolah, kepemimpinan transformatif, serta budaya kelembagaan yang menerima keberagaman sebagai aset, bukan beban. Program pelatihan guru inklusif berbasis kompetensi, pengembangan kurikulum adaptif yang mengedepankan prinsip *Universal Design for Learning* (UDL), serta asesmen autentik yang responsif terhadap keberagaman menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam perwujudan pendidikan yang setara dan bermutu (Kurniawan, 2025). Di sisi lain, mutu pendidikan juga dikonstruksikan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, serta kolaborasi multi-aktor antara sekolah, pemerintah daerah, LSM, dan dunia usaha. Keterkaitan antara inklusivitas dan mutu bukan hanya konseptual, tetapi juga operasional dan strategis.

Keberadaan teknologi digital menambah dimensi baru dalam mewujudkan

kesetaraan pendidikan yang inklusif dan bermutu. Di satu sisi, Learning Management System (LMS), platform daring, dan perangkat lunak bantu telah membuka peluang belajar bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan digital, teknologi justru dapat menjadi alat eksklusif yang memperkuat ketimpangan lama dalam format baru. Oleh karena itu, pendekatan strategis pendidikan inklusif hari ini tidak bisa lepas dari dimensi teknologi, baik sebagai alat bantu maupun sebagai medan perjuangan baru bagi keadilan pendidikan. Model kolaboratif multi-pihak (multi-stakeholder) dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan menjadi pendekatan yang menjanjikan. Studi kasus di beberapa daerah di Jawa Barat dan DI Yogyakarta menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas dapat menghasilkan model sekolah inklusif yang bukan hanya fungsional, tetapi juga inspiratif (Putri et al., 2025).

Secara normatif, pembahasan mengenai pendekatan strategis pendidikan inklusif dan penguatan mutu menjadi penting karena ia menyentuh akar dari misi pendidikan nasional: mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menuju *bonus demografi* dan membidik visi Indonesia Emas 2045, pendidikan harus menjadi alat rekayasa sosial yang memungkinkan setiap warga negara, tanpa terkecuali, untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan inklusif yang berkualitas tidak boleh diposisikan sebagai program tambahan, tetapi sebagai inti dari sistem pendidikan yang berkeadilan. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen kebijakan, strategi implementasi, dan intervensi pendidikan mampu menjawab tantangan keadilan sosial di ruang-ruang kelas yang sesungguhnya.

Motivasi lain dalam membahas tema ini adalah karena eksistensi pendidikan inklusif dan mutu pendidikan kerap kali dibicarakan dalam domain yang terpisah, padahal keduanya saling menentukan. Tanpa mutu, inklusivitas hanya akan menjadi jargon politik. Sebaliknya, tanpa inklusivitas, mutu akan hanya dinikmati oleh segelintir elit. Maka, kajian ini mencoba menawarkan pendekatan integratif yang melihat inklusi dan mutu sebagai dua sisi mata uang dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan nasional. Melalui pendekatan normatif dan analitis, tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih humanis, adaptif, dan transformatif untuk masa depan Indonesia yang lebih setara.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu pendekatan sistematis yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, penelaahan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka bukan sekadar aktivitas merangkum referensi, melainkan proses konstruktif dalam menafsirkan, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan teoretis, hasil penelitian terdahulu, kebijakan, serta dokumen resmi yang terkait. Dalam konteks pendidikan, metode ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti menggali akar filosofis, kerangka teoritis, dan dinamika empiris yang tersembunyi di balik fenomena. Penelitian ini mengandalkan berbagai literatur ilmiah seperti artikel jurnal terindeks (Scopus dan SINTA), buku ajar teori pendidikan, kebijakan nasional (UU No. 20 Tahun 2003, Permendikbud No. 70 Tahun 2009), laporan UNESCO, dan data statistik dari BPS serta Kemendikbudristek. Prosedur kajian dilakukan dengan memilah literatur berdasarkan tema besar seperti pendidikan inklusif, penguatan mutu,

dan kesetaraan pendidikan, lalu dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan deduktif dan interpretatif.

Secara metodologis, pendekatan kajian pustaka ini digunakan tidak hanya untuk merumuskan kerangka konseptual, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dan menyusun argumentasi ilmiah yang kokoh dan kontekstual. Penelitian ini menempatkan literatur sebagai objek sekaligus sumber data primer, yang kemudian dikaji melalui analisis komparatif, analisis isi, dan penalaran kritis. Hal ini memungkinkan terbentuknya pemahaman mendalam mengenai bagaimana pendekatan strategis pendidikan inklusif telah dikembangkan dalam berbagai konteks, serta bagaimana mutu pendidikan menjadi variabel penting dalam mencapai kesetaraan pendidikan nasional. Dengan metode ini, peneliti tidak terjebak pada asumsi normatif semata, melainkan membangun analisis berbasis bukti, memperkuat kredibilitas ilmiah, serta menjaga objektivitas dalam menyusun simpulan dan rekomendasi. Metode kajian pustaka juga memperluas cakrawala keilmuan karena menjembatani hasil penelitian lintas negara, lintas disiplin, dan lintas waktu, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pendidikan secara teoritis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Inklusif dalam Konteks Kesetaraan Nasional

Pendidikan inklusif hadir sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menjamin bahwa seluruh anak, tanpa memandang latar belakang fisik, kognitif, sosial, maupun budaya, memiliki hak dan peluang yang setara untuk belajar. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendidikan inklusif menjadi alat strategis untuk memperkecil kesenjangan akses, terutama bagi kelompok marginal seperti anak-anak berkebutuhan khusus, anak dari keluarga miskin, dan anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Berdasarkan data BPS (2023), angka partisipasi sekolah untuk anak-anak disabilitas masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 53,4% di jenjang pendidikan dasar (Rosyid et al., 2025). Hal ini mencerminkan ketimpangan sistemik yang tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh eksklusivitas dalam sistem pendidikan nasional.

Lebih jauh, pendidikan inklusif berperan sebagai katalisator untuk transformasi paradigma pendidikan dari yang bersifat seragam (uniformitas) menjadi yang menghargai keberagaman (diversitas) (Susanto & Yohana, 2025). Konsep ini menuntut sistem pendidikan yang fleksibel, adaptif, dan berpusat pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya pendekatan teknis, melainkan juga filosofi yang menegaskan bahwa kesetaraan bukanlah pemberian, melainkan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, pendidikan inklusif seharusnya tidak dianggap sebagai program tambahan, tetapi sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini memerlukan keberpihakan politik anggaran dan kepemimpinan transformasional di semua level pemerintahan.

Strategi Penguatan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Strategi penguatan pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan pendekatan intersektoral yang melibatkan dinas pendidikan, kementerian sosial, organisasi penyandang disabilitas, serta lembaga swadaya masyarakat. Salah satu strategi kunci adalah pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dalam menangani kelas heterogen. Studi dari UNESCO (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kapasitas guru dalam merancang pembelajaran

diferensiatif dan membangun kultur kelas yang suportif (Pujiaty, 2024). Di Indonesia, program pelatihan seperti PPG dan guru penggerak perlu dimodifikasi agar mencakup kurikulum berbasis pendidikan inklusif, bukan hanya teori pedagogi umum (Frisnoiry et al., 2025).

Selain itu, dukungan teknologi dan sumber belajar adaptif menjadi aspek penting dalam strategi ini. Pengembangan media pembelajaran digital yang ramah disabilitas—seperti audio book, video dengan bahasa isyarat, dan aplikasi pembaca teks—dapat menjembatani keterbatasan akses informasi. Namun, tantangan infrastruktur di wilayah terpencil masih menjadi hambatan utama, sehingga dibutuhkan alokasi dana afirmatif dari pemerintah pusat untuk memperkuat pemerataan. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperluas cakupan layanan pendidikan inklusif, termasuk program CSR yang diarahkan pada pendidikan berbasis keragaman. Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, pendidikan inklusif di Indonesia dapat naik kelas dari sekadar wacana menjadi sistem yang berfungsi nyata.

Penguatan Mutu sebagai Pilar Kesetaraan Pendidikan

Mutu pendidikan adalah jantung dari sistem pendidikan yang adil. Tanpa penguatan mutu, kebijakan inklusif berpotensi menjadi simbolik tanpa dampak substantif. Penguatan mutu dalam konteks pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pertumbuhan sosial-emosional peserta didik. Indikator mutu tidak bisa lagi bersandar pada ujian nasional semata, melainkan harus mencakup partisipasi aktif, keberhasilan interaksi sosial, serta kemampuan adaptasi anak dalam lingkungan belajar yang heterogen. World Bank (2021) menekankan pentingnya *learning outcome* berbasis kompetensi kontekstual dalam sistem pendidikan negara berkembang (Latansa & Sassi, 2025).

Untuk mewujudkan mutu yang merata, pemerintah harus membangun sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang inklusif dan berbasis data. Evaluasi pembelajaran, akreditasi lembaga, serta sistem supervisi perlu mengadopsi instrumen yang mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik. Dalam praktiknya, pendekatan seperti *school-based management* dan *lesson study* terbukti efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat mikro. Namun, sistem ini perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan makro yang konsisten serta pengawasan lintas sektor. Tanpa adanya transformasi mutu yang inklusif, maka kesetaraan pendidikan hanya menjadi jargon normatif yang jauh dari realitas.

Sinergi Kebijakan Inklusif dan Mutu Pendidikan dalam Kerangka Nasional

Pentingnya sinergi antara kebijakan inklusif dan kebijakan mutu pendidikan tidak bisa ditawar. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Pendidikan inklusif tanpa standar mutu yang jelas akan menghadirkan kelas-kelas dengan semangat toleransi tetapi miskin kompetensi. Sebaliknya, mutu pendidikan yang tinggi namun tidak inklusif akan memperluas ketimpangan akses. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pendidikan nasional, pemerintah perlu mengintegrasikan kedua kebijakan ini dalam satu kerangka kerja pendidikan nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas kementerian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seharusnya menjadi payung koordinatif yang menautkan visi keadilan dan kualitas dalam satu garis kebijakan.

Langkah konkret yang dapat diambil antara lain penyusunan indikator kinerja yang menggabungkan capaian inklusi dan capaian mutu, penerapan *education for all audit* secara berkala, serta peningkatan transparansi data pendidikan inklusif dalam sistem

EMIS atau Dapodik. Selain itu, penting juga mendorong partisipasi masyarakat sipil dan akademisi dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan agar tetap kontekstual dan berpihak pada yang rentan. Dengan sinergi yang kokoh, pendidikan nasional Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus menjamin bahwa setiap anak Indonesia tumbuh dalam sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari semangat konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Prinsip inklusivitas mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan—baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun kultural—dan menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem pendidikan nasional yang humanis dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendidikan inklusif bukan hanya menjadi keharusan normatif, tetapi juga kebutuhan strategis dalam menjawab kompleksitas masyarakat multietnis dan multikondisi. Hal ini memerlukan pembaruan paradigma pendidikan yang tidak lagi seragam, melainkan responsif terhadap keberagaman peserta didik.

Penguatan mutu menjadi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan inklusif. Mutu pendidikan bukan hanya terletak pada capaian akademik, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menghadirkan layanan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, penguatan kapasitas pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan kurikulum yang fleksibel, serta dukungan infrastruktur yang ramah terhadap kebutuhan khusus menjadi instrumen krusial. Hanya dengan sistem yang transformatif dan responsif, tujuan inklusivitas dapat tercapai tanpa mengorbankan standar kualitas pendidikan itu sendiri.

Kesetaraan pendidikan nasional tidak bisa dicapai dengan pendekatan yang parsial. Diperlukan sinergi antara kebijakan makro yang inklusif, praktik pendidikan yang kontekstual, serta kultur sekolah yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat luas harus menyatukan visi dalam membangun ekosistem pendidikan yang terbuka dan adil bagi semua. Dengan demikian, pendidikan inklusif dan penguatan mutu bukan hanya jargon, tetapi menjadi strategi konkret dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa dalam keberagaman sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandhari, M. U., & Silviana, S. (2025). PENGARUH PROGRAM REALISASI DANA PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 3288–3313. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5572>
- Andriani, O., Pangestu, P. E., Noviyanti, D. F., & Julianti, S. (2024). Landasan Filosofis Dalam Optimalisasi Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *JURNAL PENDIDIKAN & PENGAJARAN (JUPE2)*, 2(1), 185–201. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v2i1.270>
- Frisnoiry, S., Firdaus, M., Hutagalung, T., Ramadhani, I., & Marlan, M. (2025). Optimalisasi Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Profesi Guru (PPG). *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 1185–1194.
- Ikmal, H. (2021). *Nalar Humanisme dalam Pendidikan: Belajar dari Ki Hadjar*

- Dewantara dan Paulo Freire. Nawa Litera Publishing.
- Irdamurni, M. P. (2020). *Pendidikan inklusif: Solusi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus*. Prenada Media.
- Kurniawan, R. G. (2025). *Pembelajaran diferensiasi berbasis deep learning: Strategi mindful, meaningful, dan joyful learning*. Penerbit Lutfi Gilang.
- Latansa, M. I., & Sassi, K. (2025). Upaya Sistem Pendidikan di China dalam Meningkatkan Human Development Index. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1828–1850.
- Lestari, C., Pratiwi, R. D., Pratama, D. J., & Safitri, S. (2025). Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Pendidikan. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 1–16.
- Munawir, M., Septya, N. M., Amalia, R., & Muallifa, Z. (2025). Tantangan dan Strategi Guru Profesional dalam Menangani Keberagaman Siswa di Pendidikan Inklusif. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 275–283. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i2.858>
- Nurfadhillah, S. (2021). *Pendidikan Inklusi Pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Pujiaty, E. (2024). Strategi pengelolaan pendidikan inklusif untuk meningkatkan aksesibilitas di sekolah dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(2), 241–252.
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i2.1144>
- Rosyid, A., Sari, N., Sari, P. Z., Dharmani, I. G. A. A. N., Damayanti, E., Shabila, S., Rohani, S. T., & Prastoeti, R. (2025). Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran terhadap IPM di Indonesia Periode 2021-2023. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(2), 111–123.
- Shofi, A., Padilah, C. K., Laborahima, M. J., Nurhalimah, S., & Azis, A. (2025). PENDIDIKAN INKLUSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN PENDIDIKAN. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2(1), 267–276.
- Susanto, A., & Yohana, Y. (2025). Pengaruh Keragaman Individu Terhadap Proses Pembelajaran Dan Pengajaran. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 1–15.